

BAB III

**GAMBARAN UMUM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
(SPP) DESA TUNGU KECAMATAN GODONG KABUPATEN
GROBOGAN**

A. Gambaran Umum Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

1. Tempat Penelitian

a. Letak Geografis

Desa Tunggu merupakan salah satu desa dari 28 desa yang ada di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Jarak Desa Tunggu dari Kecamatan Godong sekitar 12 Km dan dapat di tempuh sekitar 40 menit. Desa Tunggu memiliki luas 230.023 Ha yang terdiri dari pemukiman 38 Ha, sawah 157 Ha, ladang 24 Ha, lain-lain 11.023 Ha, dan Desa Tunggu hanya terdiri dari satu dusun saja.

Desa Tunggu berbatasan langsung dengan:

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Latak Kec. Godong

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pahesan Kec. Godong

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jeketro Kec. Gubug

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Saban Kec. Gubug¹

b. Penduduk

Desa Tunggu pada tahun 2013 memiliki penduduk sebanyak 2.278 jiwa dengan 664 kepala keluarga (KK) di antaranya 255 KK

¹ Data batas wilayah dan kependudukan Desa Tunggu tahun 2013.

miskin. Penduduk laki-laki sebanyak 1.133 orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 1.145 orang, dimana seluruh masyarakat Desa Tunggu beragama muslim.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan KK Desa Tunggu Tahun 2013

Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepala Keluarga	KK Miskin
1.133	1.145	2.278	664	255

Sumber: Sensus Kependudukan Desa Tunggu Tahun 2013

c. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Tunggu mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebanyak 70%, ini berarti penduduk menggantungkan diri terhadap lahan pertanian. Persentase paling sedikit adalah mata pencaharian penjahit sebanyak 2%, mata pencaharian pedagang sebanyak 10%, mata pencaharian sebagai guru dan pegawai sebanyak 10%, bermata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 5%, dan bermata pencaharian sebagai buruh sebanyak 3%.²

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Desa Tunggu Tahun 2013

No.	Mata Pencaharian	Persentase
1.	Petani dan Buruh Tani	70 %
2.	Penjahit	2 %
3.	Guru dan Pegawai	10 %

² *Ibid.*

4.	Wiraswasta	5 %
5.	Buruh	3 %
6.	Pedagang	10 %
	Jumlah	100 %

Sumber: Sensus Kependudukan Desa Tunggu Tahun 2013

2. Profil Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM-MP

PNPM Mandiri di canangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan diantara bentuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah melalui pemanfaatan simpan pinjam untuk perempuan.³

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini di dukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia.⁴

³ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:⁵

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa.⁶

Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.⁷

PNPM Mandiri Perdesaan masuk di Desa Tunggu pada tahun 2009 dan disertai dengan adanya program SPP. Dalam salah satu tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin atau kelompok perempuan. Dan adanya kesetaraan dan keadilan gender, yang berarti masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, dan membantu perekonomian masyarakat miskin yang produktif.⁸

Salah satu jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah SPP, yaitu kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Tujuan umum kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan

⁷ Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, hlm. 2.

⁸ Wawancara dengan Bapak Erwin selaku fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, 30/7/2014 pukul 11.00 WIB.

tujuan secara khusus kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.⁹

B. Implementasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

1. Prinsip Dasar SPP Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Beberapa prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:¹⁰

a. Bertumpu pada pembangunan manusia

Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.

⁹ PTO Penjelasan IV: *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, hlm. 58.

¹⁰ *Op. Cit*, hlm. 2.

b. Otonomi

Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar.

c. Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

d. Berorientasi pada masyarakat miskin

Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

e. Partisipasi

Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil.

f. Kesetaraan dan keadilan gender

Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan

pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

g. Demokratis

Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.

h. Transparansi dan Akuntabel

Transparan dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

i. Prioritas

Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan.

j. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

2. Ketentuan Dasar SPP

Ketentuan dasar dalam kegiatan SPP meliputi:¹¹

a. Kemudahan

Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.

b. Terlembagakan

Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

c. Keberdayaan

Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.

d. Pengembangan

Pengembangan artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

¹¹ *Ibid.*

3. Sasaran, Bentuk Kegiatan, dan Ketentuan Kelompok SPP

a. Sasaran Program

Sasaran program SPP adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

b. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

c. Ketentuan Kelompok SPP

Ketentuan kelompok SPP adalah:¹²

- 1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- 2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- 3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

¹² *Ibid*, hlm. 59.

- 4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- 5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

4. Jenis dan Fungsi Kelompok SPP

a. Jenis Kelompok

Jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir SPP adalah:¹³

- 1) Kelompok Simpan Pinjam (KSP), adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota Rumah Tangga Miskin (RTM).
- 2) Kelompok Usaha Bersama (KUB), adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
- 3) Kelompok Aneka Usaha, adalah kelompok yang anggotanya Rumah Tangga Miskin yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

b. Fungsi Kelompok

Fungsi kelompok dalam melayani peminfaat dana bergulir SPP dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

¹³ PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta, hlm. 1.

- 1) Kelompok *Chanelling* (penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
- 2) Kelompok *Executing* (pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

5. Struktur Kelompok SPP

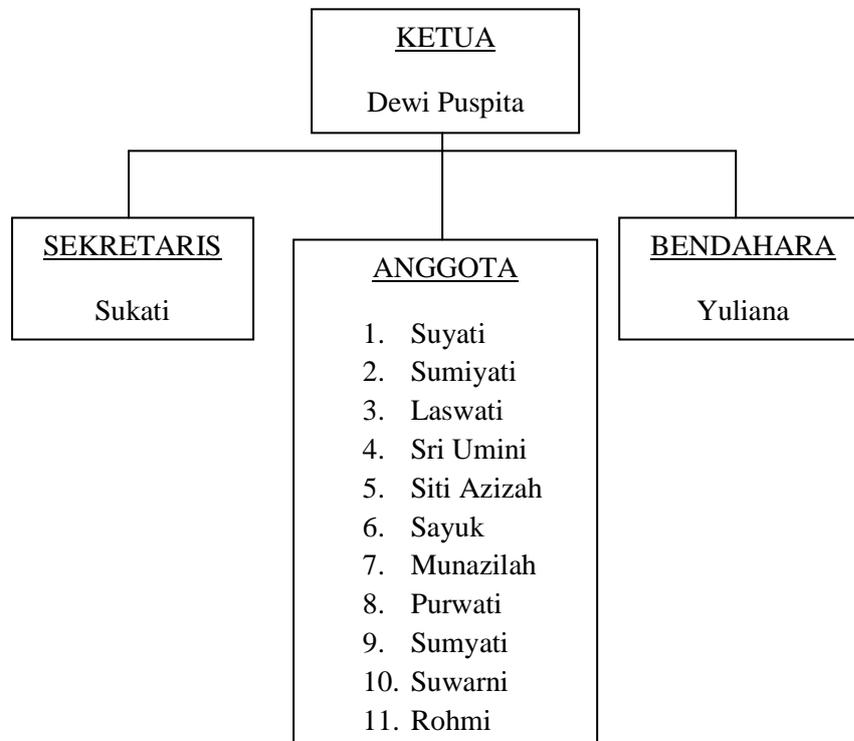
Kelompok-kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Desa Tunggu dalam menjalankan kegiatan kelompoknya agar berjalan sesuai dengan aturan kelompok yang telah ditetapkan, setiap kelompok harus memiliki struktur kelompok, masing-masing kelompok terdapat pengurus kelompok yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok, 1 (satu) orang sekretaris kelompok, 1 (satu) orang bendahara kelompok dan anggota kelompok minimal 5 (lima) orang maksimal 15 (lima belas) orang.

Struktur kelompok masing-masing kelompok SPP sama. Untuk lebih jelasnya struktur masing-masing kelompok dapat dilihat pada gambar kelompok Melati dan kelompok Mawar berikut ini:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.



Gambar 3.1 Struktur Kelompok Melati di Desa Tungu



Gambar 3.2 Struktur Kelompok Mawar di Desa Tungu

Pelaksanaan kegiatan dalam masing-masing kelompok SPP, ketua bertugas memimpin rapat, memberikan informasi kepada anggota, mewakili kelompok dalam pengurusan proposal pengajuan pinjaman dana ke pihak PNPM Mandiri Perdesaan dan bertanggung jawab atas semua anggota kelompok. Sekretaris kelompok bertugas mencatat keputusan musyawarah kelompok dan bersama ketua mewakili kelompok untuk mengurus kepentingan kelompok. Sedangkan bendahara kelompok bertugas untuk mencatat pembukuan uang iuran kelompok, pengurusan uang pinjaman dan mengurus keuangan kelompok.¹⁵

6. Pengelolaan Dana UPK

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan, kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP. Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.¹⁶

¹⁵ PTO Penjelasan IV: *Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta, hlm. 60.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1.

Pengelolaan kegiatan dana bergulir dalam SPP dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasar sebagai berikut:¹⁷

a. Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir

Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program. Penyediaan dana tersebut merupakan kebutuhan prioritas masing-masing wilayah pada saat pelaksanaan program sehingga BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak masyarakat yang berdomisili pada wilayah program sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak diperkenankan memindahkan hak pelayanan kepada masyarakat keluar lokasi wilayah. Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat.

b. Kemudahan Akses Pendanaan Usaha Bagi RTM

Kemudahan akses pendanaan bagi usaha mikro yang dilakukan oleh RTM (Rumah Tangga Miskin) yang tidak mempunyai akses langsung pada lembaga keuangan formal maupun informal.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

c. Pelestarian Prinsip Pengelolaan

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

d. Pelestarian Kelembagaan

Pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan seperti: UPK, kelompok peminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), badan pengawas UPK, dan tim penyehatan pinjaman.

e. Pengembangan Kelompok

Dalam pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap memperhatikan pengembangan kelompok yang beranggotakan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir dalam SPP mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM, hal ini di dasari oleh beberapa kondisi diantaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan

mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai.¹⁸

Adapun tahapan pengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁹

a. Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok

Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD (Musyawarah Antar Desa) atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa);

b. Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh UPK

UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat kelompok ini, riwayat pinjaman kelompok pada UPK, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada tim verifikasi.

c. Verifikasi oleh Tim Verifikasi

Tim verifikasi melakukan verifikasi usulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

d. Keputusan Pendanaan

e. Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim yang telah ditetapkan BKAD atau MAD dan sesuai dengan ketentuan pendanaan yang telah ditetapkan oleh BKAD atau MAD.

¹⁸PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹*Ibid.*

Peraturan pinjaman yang diatur dalam pinjaman dana bergulir antara lain:²⁰

- a. Peminjam adalah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan (masyarakat miskin dan sesuai dengan hasil survei lapangan yang tertuang dalam dokumen pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan ketentuan dan kriteria kemiskinan yang telah disepakati bersama);
- b. Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan usaha baru (tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan-pelatihan pengembangan ekonomi lokal);
- c. Pada tahun 2009 besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- dan pada tahun 2012 terjadi perubahan besar pinjaman pertama kali berubah menjadi maksimal Rp 1.000.000,- namun disesuaikan dengan usaha peminjam;
- d. Jangka waktu pinjaman 10 bulan;
- e. Angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu).

Beberapa prinsip dasar dalam pemberian pinjaman dana bergulir yang perlu mendapat perhatian dari UPK antara lain:²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) yang dialokasikan untuk kegiatan pinjaman dana bergulir adalah milik masyarakat kelurahan atau desa sasaran dan bukan milik perorangan;
- b. Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman dana bergulir dalam SPP adalah dalam rangka membantu program penanggulangan kemiskinan dan oleh karenanya harus menjangkau warga masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. Pengelolaan pinjaman dana bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
- d. Pengelolaan pinjaman dana bergulir dipisahkan antara LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagai representasi dari warga masyarakat pemilik modal dengan UPK sebagai pengelola kegiatan pinjaman dana bergulir yang bertanggungjawab langsung kepada LKM;
- e. Prosedur serta keputusan pemberian pinjaman harus mengikuti prosedur pemberian pinjaman dana bergulir standar yang ditetapkan;

²¹ *Ibid*, hlm.4.

- f. Manajer dan petugas UPK harus orang yang mempunyai kemampuan dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dasar yang diadakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan;
- g. UPK telah mempunyai sistem pembukuan yang standar dan sistem pelaporan keuangan yang memadai.

Sebelum anggota kelompok mendapatkan pinjaman dana dari SPP, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan pinjaman antara lain:²²

- a. Pendataan calon peminjam dana SPP dengan membawa fotocopy KTP suami istri;
- b. Pengarahan kepada calon peminjam tentang aturan pinjaman dan cara pembayaran angsuran pinjaman dari pengelola;
- c. Pengarahan pada calon peminjam tentang pemanfaatan dana pinjaman agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan usaha, agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan taraf hidup keluarga;
- d. Mengajak musyawarah kepada anggota, untuk kelangsungan kegiatan simpan pinjam agar semua anggota yang belum mendapatkan pinjaman akan mendapatkan pinjaman pada waktu yang akan datang;
- e. Mengisi perjanjian tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan

²² *Ibid.*

bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya);

f. Anggota kelompok harus membayar tepat waktu.

Hasil wawancara dengan bapak Sholekan di Desa Tungu, masyarakat merasa senang dengan adanya program pemerintah PNPM Mandiri Perdesaan. Hadirnya SPP dari PNPM-MP membawa hal baik bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelum adanya SPP, masyarakat kesulitan untuk mencari tambahan modal yang tidak menggunakan jaminan, sehingga usaha masyarakat sulit berkembang. Setelah adanya SPP, masyarakat terbantu untuk mengembangkan usahanya dan bisa menambah pendapatan keluarga.²³

Dari hasil wawancara penulis kepada anggota SPP kelompok Melati satu yaitu Ibu Kanah, sebagai berikut: ibu Kanah mempunyai usaha ternak ayam kampung sejak tahun 2010, sebelum itu ibu Kanah pernah mempunyai usaha pembibitan ikan lele, namun gagal. Sehingga ibu Kanah mempunyai ide untuk beralih ke usaha ternak ayam kampung. di awal-awal menjalankan usaha ibu Kanah mengalami kekurangan modal, karena modal ibu Kanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2011, ibu Kanah mencoba mendaftarkan diri sebagai anggota SPP dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh SPP.

²³ Wawancara dengan bapak Sholekan selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa Tungu 9/6/2014 pukul 15.00 WIB.

Bentuk pinjaman senilai Rp 2.000.000,- itu sangat membantu bagi ibu Kanah. Sebelum mendapatkan pinjaman dana dari SPP, pendapatan ibu Kanah sekitar Rp75.000,- per hari, sesudah mendapatkan pinjaman dana dari SPP pendapatan ibu Kanah menjadi sekitar Rp 100.000,- sampai Rp 150.000,- per hari dan sebulan pendapatan bisa sekitar Rp 3.000.000,- sampai Rp 4.000.000.

Saat ini ibu Kanah mencoba untuk mengembangkan usahanya dengan ternak ayam pedaging atau “ayam potong”. Menjelang lebaran ayam potong tersebut sangat di minati oleh masyarakat sebagai menu makanan dalam suasana lebaran. Harapan ibu Kanah kedepan, kegiatan SPP ini tetap di jalankan dan diajukan dalam proposal kegiatan SPP, agar masyarakat miskin lainnya bisa terbantu perekonomiannya.

Hasil wawancara kepada ibu Kanah, penulis dapat menyimpulkan manfaat yang di dapatkan ibu Kanah setelah mendapatkan pinjaman dari SPP yaitu:

- a. Penghasilan ibu Kanah lebih tinggi dibandingkan sebelum mendapatkan pinjaman, dilihat dari penghasilan sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman, hidup ibu Kanah bisa lebih sejahtera.

- b. Usaha ibu Kanah semakin berkembang, yang awalnya hanya ternak ayam kampung, sekarang ini bisa mengembangkan dengan ternak ayam pedaging atau “ayam potong”.²⁴

Hasil wawancara penulis kepada anggota SPP kelompok Melati kedua yaitu ibu Ummu Sholekah, sebagai berikut: ibu Ummu Sholekah mendirikan usaha toko sembako sejak tahun 2004. Di awal-awal usahanya, penghasilan ibu Ummu Sholekah hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Pendapatan bisa meningkat hanya pada musim panen padi saja, karena letak rumah ibu Ummu Sholekah terletak di tempat yang strategis yaitu berada di perempatan jalan raya.

Pada tahun 2010, ibu Ummu Sholekah mencoba meminjam dana di SPP dengan tujuan agar bisa menambah barang-barang dan sembako di tokonya. Ibu Ummu Sholekah memperoleh pinjaman modal dengan dua tahapan, tahapan pertama yaitu Rp 1.000.000,- dan tahapan yang kedua Rp 2.000.000,-.

Pendapatan ibu Ummu Sholekah sebelum mendapatkan pinjaman dana dari SPP setiap minggunya sekitar Rp 400.000,-, terkadang tidak sampai Rp 400.000,- dalam seminggu. Setelah mendapatkan pinjaman dana SPP pendapatan ibu Ummu Sholekah setiap minggunya sekitar Rp 700.000,-, apalagi waktu musim panen padi tiba pendapatan ibu Ummu Sholekah bisa mencapai Rp 1.000.000,- setiap minggunya.

²⁴ Wawancara dengan ibu Kanah, pemilik usaha ternak ayam kampung yang mendapatkan pinjaman dari SPP, RT 05 RW 01, 2/7/2014 pukul 10.00 WIB.

Saat ini usaha ibu Ummu Sholekah sangat berkembang, dimana dulu sulit untuk menambah isi tokonya, sekarang toko ibu Ummu Sholekah sudah di penuh oleh jajanan, perabotan rumah tangga, sembako, dan masih banyak lagi lainnya.

Dari hasil wawancara kepada ibu Ummu Sholekah, penulis dapat menyimpulkan bahwa manfaat yang diterima oleh ibu Ummu Sholekah setelah mendapatkan pinjaman dana dari SPP yaitu:

- a. Segi finansial ibu Ummu Sholekah mengalami peningkatan, penghasilan meningkat, dan perekonomian lebih maju.
- b. Usaha ibu Ummu Sholekah yang dulunya berkembang hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sekarang bisa lebih maju bisa memenuhi isi tokonya dengan lengkap.²⁵

Wawancara yang ketiga penulis dengan salah satu anggota SPP kelompok Mawar yaitu dengan ibu Sukati sebagai berikut: ibu Sukati mempunyai usaha toko sembako sejak tahun 2011, sebelum mempunyai usaha toko sembako ibu Sukati pernah usaha pesanan roti atau kue, itu pun kalau ada tetangga yang memesan kepada ibu Sukati, sehingga ibu Sukati tidak bisa mengembangkan usahanya.

Pada tahun 2011 ibu Sukati mengajukan pinjaman ke pengelola SPP dengan membawa persyaratan seperti fotocopy KTP suami istri, pertemuan dan sosialisasi, dan menceritakan usaha yang sedang

²⁵ Wawancara dengan ibu Ummu Sholekah, selaku pelaku usaha toko sembako yang mendapatkan pinjaman dana dari SPP, RT 06 RW 01, 2/7/2014 pukul 10.15 WIB.

dijalankan. Ibu Sukati mendapatkan pinjaman dana dari SPP sebesar Rp 2.000.000,-.

Penghasilan ibu Sukati sebelum mendapatkan pinjaman dana dari SPP sekitar Rp 50.000,- per hari, setelah mendapatkan pinjaman dana dari SPP penghasilan ibu Sukati meningkat sekitar Rp 100.000,-. Saat ini usaha ibu Sukati bisa lebih berkembang, yang dulunya kesulitan untuk menambah isi tokonya, namun setelah mendapatkan pinjaman dari SPP ibu Sukati bisa membeli sembako yang lebih banyak lagi untuk memperbanyak isi tokonya.

Dari hasil wawancara dari penulis kepada ibu Sukati dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh oleh ibu Sukati setelah mendapatkan pinjaman dana dari SPP sebagai berikut:

- a. Pendapatan ibu Sukati meningkat, ekonomi keluarga lebih terbantu.
- b. Usaha ibu Sukati berkembang yang awalnya kesulitan untuk menambah isi tokonya, namun sekarang sudah bisa memenuhi isi tokonya dengan kebutuhan pokok sehari-hari.
- c. Ibu Sukati juga berharap agar kegiatan semacam ini terus tetap berjalan agar bisa membantu pedagang kecil.²⁶

²⁶ Wawancara dengan ibu Sukati, selaku pelaku usaha toko sembako yang mendapatkan pinjaman dana dari SPP, RT 13 RW 02, 2/7/2014 pukul 10.30 WIB.

7. Distribusi Dana SPP

Jumlah dana yang disalurkan masing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok kepada PNPM Mandiri Perdesaan. Setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Perdesaan akan melakukan verifikasi ke kelompok selanjutnya apabila kelompok lulus verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan.²⁷

Untuk kelompok Melati jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak Rp 20.000.000,- dengan jumlah anggota sebanyak 12 orang, untuk kelompok Mawar jumlah dana yang disalurkan sebanyak Rp 31.000.000,- dengan jumlah anggota 14 orang.²⁸

Peminjaman dana dilakukan secara kelompok dan pengembaliannya pun harus secara kelompok pula. Dalam pengembalian pinjaman dana SPP, setiap anggota dikenakan biaya tambahan (bunga) sebesar 1,6 % per bulan. Dimana 0,3 % digunakan untuk biaya operasional UPK, 0,2 % untuk biaya operasional TPK desa dan sisanya yaitu 1,1 % untuk biaya pengembangan masyarakat.²⁹

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Eko Budi Santoso selaku ketua UPK, sasaran utama pelaksanaan kegiatan

²⁷ PTO Penjelasan X: *Pengelolaan Dana Bergulir*, Jakarta, hlm. 8.

²⁸ Data dari proposal Usulan Kelompok Perempuan pada kelompok Melati dan Mawar tahun 2013.

²⁹ Wawancara dengan bapak Sholekan selaku ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di Desa Tunggu, 9/6/2014 pukul 15.00 WIB.

SPP adalah rumah tangga miskin (yang berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan atau desa, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin yang produktif dan ingin mengembangkan keahlian atau usahanya. Beliau juga mengatakan bahwa alur atau cara untuk memperoleh dana SPP yaitu mengajukan proposal dari kelompok-kelompok yang ditulis oleh tim penulis di desa untuk diajukan ke UPK di kecamatan. Kemudian dari tim verifikasi melakukan kunjungan lapangan di desa untuk memastikan anggota tersebut layak untuk mendapatkan dana SPP atau tidak. Hasil dari kunjungan lapangan tersebut dibahas di tim pendanaan.³⁰

³⁰ Wawancara dengan bapak Eko Budi Santoso selaku ketua UPK di Kecamatan Godong, 30/6/2014 pukul 11.05 WIB.